

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kabupaten/kota layak anak merupakan susunan pembangunan kabupaten/kota yang berfokus pada hak anak. Susunan pembangunan melalui pengintegrasian dari sumber daya pemerintah, masyarakat dan sektor usaha yang dilaksanakan dengan komitmen tanggung jawab yang tinggi. Tahapan ini direncanakan secara berkelanjutan dan komprehensif dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Pembentukan Kabupaten/kota layak anak bertujuan untuk meningkatkan usaha dalam memenuhi hak-hak dan memberikan perlindungan bagi mereka. Selain itu KLA bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak-anak itu sendiri, dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi anak-anak. Kota Semarang merupakan kota yang menerapkan kebijakan atau program kabupaten/kota layak anak (KLA) yang telah mendapatkan penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA) pada tahun 2023 dengan meraih predikat sebagai kategori Utama yang sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut memperoleh predikat Nindya. Kota Semarang yang memiliki kedudukan sebagai PKN (pusat kegiatan nasional) sekaligus sebagai pusat ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh terhadap ketersediaan fasilitas sarana pendidikan, khususnya sarana pendidikan sekolah dasar (SD) yang lengkap untuk menunjang kegiatan. Namun, masih terdapat wilayah pada Kota Semarang yang belum terjangkau sarana pendidikan sekolah dasar (SD).

Kota Semarang memiliki potensi pada ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan. Kota Semarang terdapat fasilitas sarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan industri. Persebaran sarana pendidikan di Kota Semarang meliputi jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Berdasarkan BPS Kota Semarang jumlah sarana pendidikan meliputi 669 TK, 507 SD, 194 SMP, 70 SMA, dan 83 SMK. Sementara berdasarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) jumlah sarana pendidikan terdiri dari 701 TK, 513 SD, 199 SMP, 73 SMA, dan 86 SMK. Ketersediaan sarana pendidikan didukung dengan adanya jaringan jalan dan aksesibilitas yang mudah untuk di tempuh dan mendorong aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Jaringan jalan di Kota Semarang memiliki jaringan jalan

yang lengkap, meliputi jalan tol, jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Aksesibilitas untuk moda transportasi umum dilengkapi dengan armada, rute, dan halte bus *rapid* transit (BRT).

Analisis keterjangkauan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) yang dilakukan pengolahan *software* Sistem Informasi Geografis ArcGIS menggunakan metode *buffer* atau jangkauan pelayanan. Ketersediaan sarana pendidikan ditinjau dengan menggunakan standar SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dengan radius pencapaian untuk sekolah dasar (SD) mencapai 1.000 meter dan jangkauan jarak pejalan kaki ideal dari titik awal menuju titik transit lain atau daerah tujuan, yaitu 400 meter. Keterjangkauan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) terhadap permukiman di Kota Semarang yang dijabarkan melalui keterjangkauan *buffer* radius terhadap permukiman, keterjangkauan *buffer* menurut jaringan jalan, dan keterjangkauan sekolah dasar (SD) dari halte bus rapid transit (BRT). Keterjangkauan *buffer* radius terhadap permukiman diperoleh hasil sarana pendidikan sekolah dasar (SD) sudah hampir menjangkau keseluruhan wilayah di Kota Semarang. Keterjangkauan *buffer* menurut jaringan jalan diperoleh sebagian besar permukiman yang belum terjangkau oleh sarana pendidikan sekolah dasar (SD). Keterjangkauan sekolah dasar (SD) dari halte bus *rapid* transit (BRT) masih banyak halte yang belum menjangkau keseluruhan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) berbagai kecamatan di Kota Semarang.

Berdasarkan ketiga analisis tersebut, didapatkan bahwa luas permukiman yang tidak terjangkau lebih besar saat menggunakan metode keterjangkauan *buffer* menggunakan jaringan jalan. Selain permukiman yang tidak terjangkau, keterjangkauan transportasi umum menuju sarana pendidikan sekolah dasar (SD) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan masih terdapat sekolah yang tidak terjangkau oleh transportasi umum.

5.2 Rekomendasi

Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas sarana pendidikan sekolah dasar (SD) di Kota Semarang sejumlah 513 sekolah dasar dilakukan penelitian mengenai **“Kajian Ketersediaan dan Analisis Keterjangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Terhadap Permukiman Kota Semarang”** dengan menggunakan metode analisis *buffer* melalui keterjangkauan *buffer* radius terhadap permukiman, keterjangkauan *buffer* menurut jaringan jalan, dan keterjangkauan sekolah dasar (SD) terhadap halte bus *rapid* transit (BRT) menunjukkan bahwa masih terdapat sekolah dasar (SD) di Kota Semarang terdapat

wilayah yang belum terjangkau. Pada analisis keterjangkauan *buffer* radius terhadap permukiman terdapat permukiman yang seluas 477,53 Ha yang belum terjangkau oleh sarana pendidikan sekolah dasar (SD). Sementara analisis keterjangkauan *buffer* menurut jaringan jalan terdapat permukiman yang belum terjangkau sarana pendidikan sekolah dasar (SD) seluas 2.933,78 Ha. Kemudian keterjangkauan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) dari halte bus *rapid* transit (BRT) terdapat 218 sekolah dasar (SD) yang belum terjangkau oleh halte bus *rapid* transit (BRT). Berdasarkan hasil analisis tersebut menjadi dasar sarana pendidikan sekolah dasar (SD) masih memerlukan perhatian dari pihak pemerintah dan akademisi sebagai upaya dalam meningkatkan pemerataan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) di Kota Semarang, seperti:

A. Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Semarang)

1. Perlu adanya kebijakan standar sarana dan prasarana sekolah dasar (SD) mengenai penyediaan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) bagi pihak swasta mengenai wilayah yang belum terjangkau oleh sarana pendidikan sekolah dasar (SD).
2. Perlu adanya evaluasi lokasi sekolah dasar terhadap kawasan rawan bencana meliputi rawan bencana banjir, gerakan tanah, kegempaan, dan amblesan.
3. Perlu adanya penyesuaian bangunan sekolah dasar (SD) untuk beradaptasi dengan kerawanan bencana rendah, sedang, dan tinggi.
4. Perlu adanya evaluasi standar sarana dan prasarana sekolah dasar (SD) terkait penyediaan sekolah dasar (SD) sehingga keterjangkauan sekolah dasar (SD) merata dan tidak memusat pada beberapa kecamatan.

B. Pemerintah (Dinas Perhubungan Kota Semarang)

1. Aksesibilitas moda transportasi umum perlu adanya penambahan halte bus *rapid* transit (BRT) Semarang yang dilihat sesuai standar SNI No. 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan dari radius jangkauan pelayanan mencapai 400 meter maka halte bus *rapid* transit (BRT) Semarang membutuhkan penambahan sebesar 218 halte bus *rapid* transit (BRT) Semarang pada sarana pendidikan sekolah dasar (SD) yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang.

2. Perlu adanya penyediaan bus sekolah dan yang berhenti pada kawasan permukiman yang tidak terjangkau oleh radius permukiman, jaringan jalan, halte BRT
3. Perlu adanya evaluasi terkait penyediaan koridor/bus sekolah untuk peserta didik sekolah dasar (SD).

C. Akademisi

1. Adanya penelitian mengenai keterjangkauan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) di Kota Semarang dengan metode yang berbeda.
2. Adanya penelitian mengenai kebijakan penyediaan sarana pendidikan sekolah dasar (SD) berdasarkan jumlah akurat penduduk usia jenjang sekolah dasar (SD) di Kota Semarang.